

**EKSISTENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG -UNDANG NO. 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN
PRIMA DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan Oleh

MUHLISIN

201902020

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2021**

**EKSISTENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) MENURUT UNDANG -UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KINERJA DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA
DI KABUPATEN DEMAK**

**Disusun oleh
MUHLISIN
201902020**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Februari 2021

Susunan Dewan Penguji
Pembimbing Utama



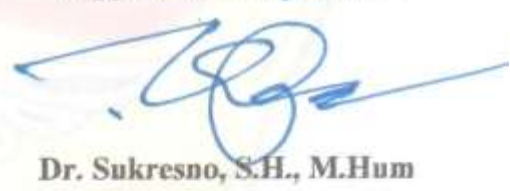
Dr. Dra. Sulistyowati., SH. C.N.

Anggota Dewan Penguji I




Dr. Hidayatullah. S.H M.Hum

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 25 Februari 2021



Dr. Iskandar Wibawa., S.H., M.Hum.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan
(QS. Al-Insyirah, ayat 5)*

*Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu
sendiri yang mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya
(QS. Ar-Ra'd, ayat 11)*

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Istri dan anakku.
2. Kedua orang tuaku.
3. Seluruh keluarga besarku.
4. Sahabat seperjuanganku semuanya.
5. Almamaterku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHLISIN

NIM : 201902020

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, Februari 2021

Yang membuat pernyataan



MUHLISIN

KATA PENGANTAR

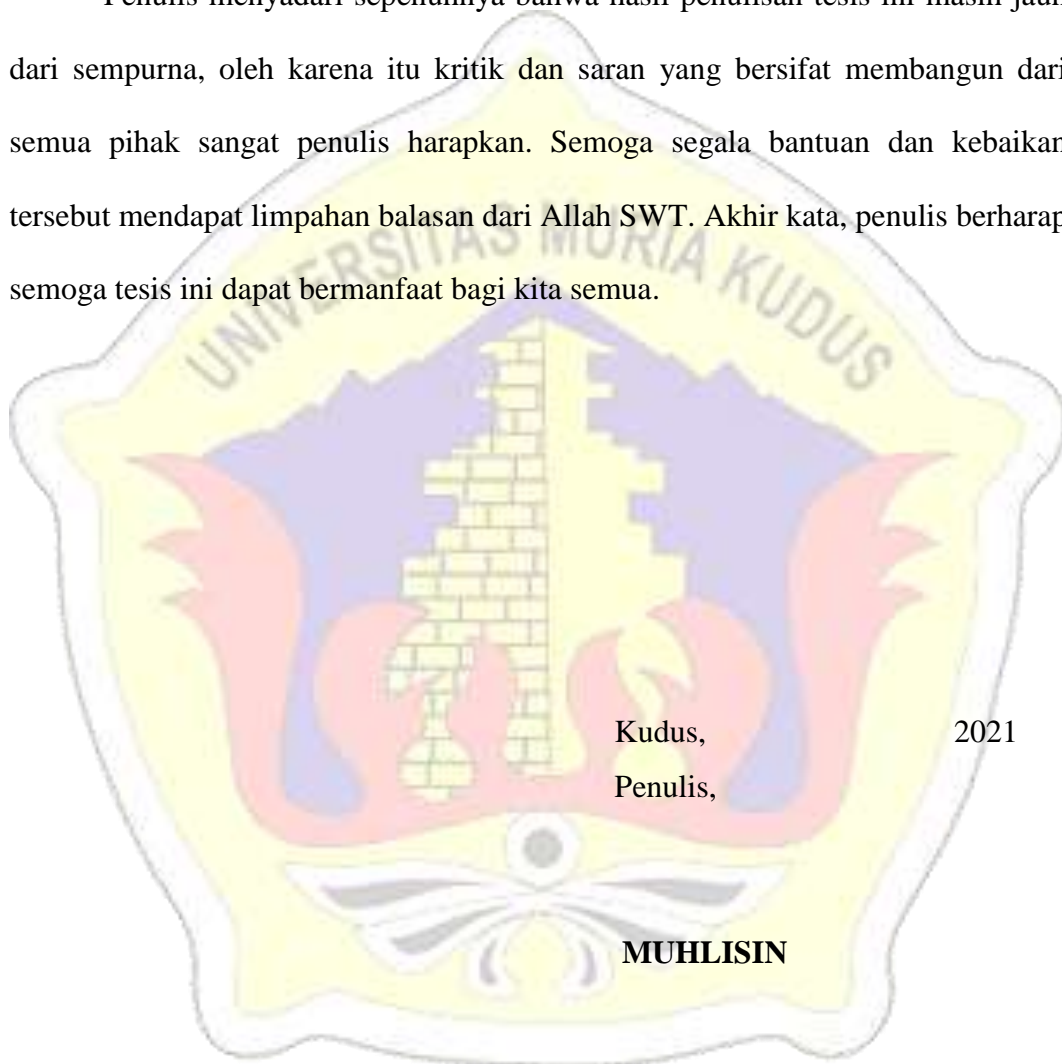
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Eksistensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Dan Mewujudkan Pelayanan Prima Di Kabupaten Demak”. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Penulisan tesis ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum.

Segala keterbatasan yang ada pada penulis, penulis juga menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan kerjasama yang baik dari beberapa pihak tidaklah mungkin dapat terselesaikan penulisan tesis ini, sehingga dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si, selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

4. Ibu Dr. Dra. Sulistyowati, S.H.,C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan tesis ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Kudus, 2021
Penulis,

MUHLISIN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAKS.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Mengenai Eksistensi.....	26
B. Tinjauan Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27

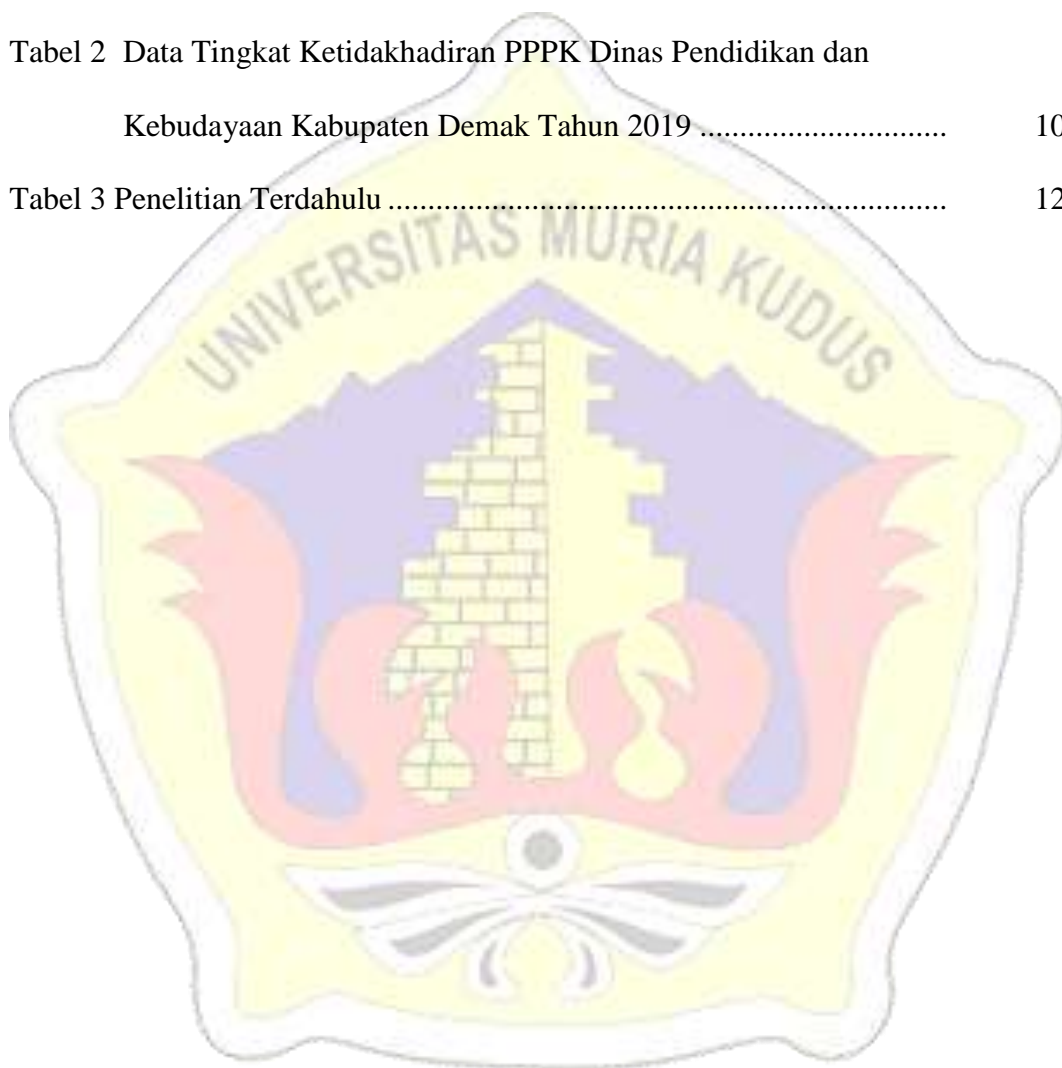
1. Pengertian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27
2. Prosedur Pengangkatan.....	28
3. Pejabat yang Berwenang Melakukan Pengangkatan	30
4. Prosedur Pemberhentian	31
5. Hak dan Kewajiban PPPK.....	32
C. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara.....	33
1. Pengertian Aparatur Sipil	33
2. Asas dan Prinsip Manajemen Aparatur Sipil Negara	36
3. Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara	39
D. Tinjauan Mengenai Kinerja Pegawai.....	39
1. Pengertian Kinerja Pegawai.....	39
2. Dimensi Kinerja.....	41
3. Penilaian Kinerja Pegawai	45
4. Indikator Kinerja Pegawai	46
5. Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja Pegawai	49
E. Tinjauan Tentang Pelayanan Prima	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	53
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014	

tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	70
BAB IV PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data PNS, Tenaga Honorer dan PPPK di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.....	7
Tabel 2 Data Tingkat Ketidakhadiran PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2019	10
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	12



EKSISTENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) MENURUT UNDANG -UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA DAN MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN DEMAK

Muhlisin¹, Sulistyowati²
Universitas Muria Kudus
Muhlisin @umk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul eksistensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) menurut undang -undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam upaya meningkatkan kinerja dan mewujudkan pelayanan prima di kabupaten demak. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke-IV menyatakan salah satu tujuan Negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penegasan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak mampu melakukannya sendiri.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik tersebut banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya dengan menciptakan aparatur yang mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Membuat regulasi yang benar melalui peraturan perundang-undangan merupakan langkah kongkrit dalam menciptakan aparatur yang baik tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. ASN adalah gabungan dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK.

PPPK didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK dengan Pegawai honorer walaupun memiliki kedudukan hampir sama, namun tidak serta secara otomatis bagi pegawai honorer sekarang dapat langsung menjadi PPPK dikarenakan secara prinsip kedua jenis pegawai ini sangat berbeda.

Kata kunci : Eksistensi, Pelayanan Prima, Aparatur Sipil, PPPK

¹ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

² Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

**GOVERNMENT EMPLOYEE EXISTENCY WITH A WORKING
AGREEMENT (PPPK) ACCORDING TO LAW NO. 5 OF 2014
CONCERNING STATE CIVIL SERVICES IN EFFORTS TO IMPROVE
PERFORMANCE AND MAKE PRIMA SERVICES IN DEMAK DISTRICT**

Muhlisin¹ Sulistyowati²
Universitas Muria Kudus
Muhlisin @umk.ac.id

ABSTRACT

This research with the title of the existence of government employees with a work agreement (PPPK) according to law no. 5 of 2014 concerning the state civil apparatus in an effort to improve performance and realize excellent service in Demak district. The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, hereinafter abbreviated to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph states that one of the objectives of the Indonesian State is to form a government of the Indonesian State which protects the entire Indonesian nation and all Indonesian blood. The affirmation in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is part of efforts to achieve national goals, both in the form of human resources and in the form of means, because the state is unable to do it alone.

To realize a good government, there are many things that must be considered, one of which is by creating an apparatus capable of running the wheels of government in accordance with the objectives of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Civil Servants, hereinafter abbreviated as PNS, are Indonesian citizens who meet certain requirements, are appointed as ASN Employees on a permanent basis by civil servants to occupy government positions. ASN is a combination of civil servants and government employees with a work agreement, hereinafter abbreviated as PPPK.

PPPK is defined as an Indonesian citizen who meets certain conditions, who is appointed based on a work agreement for a certain period of time in the context of carrying out government duties. PPPK and honorary employees even though they have almost the same position, but not automatically, now honorary employees can immediately become PPPK because in principle the two types of employees are very different.

Keywords: *Existence, Excellent Service, Civil Apparatu, PPPK*

¹ Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

² Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus